

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diterima pada Periode Tahun 2009 yang berjumlah 59 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskripsi identitas responden menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan terakhir serta jabatan, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	38	64,41
2	Perempuan	21	35,59
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 3 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden penelitian ini berjenis kelamin laki-laki. Lebih banyaknya responden laki-laki dibandingkan dengan responden perempuan dalam hal ini dapat berkaitan dengan jenis atau bidang pekerjaan CPNSD Provinsi Lampung tahun 2009,

yaitu tenaga teknis seperti pelatih olahraga, olahragawan berprestasi dan tenaga penyuluh lapangan. Tenaga teknis tersebut lebih didominasi oleh pelamar berjenis kelamin laki-laki.

(Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010).

2. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur

Untuk mengetahui identitas responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	30 – 35 Tahun	6	10,17
2	25 – 29 Tahun	31	52,54
3	20 – 24 Tahun	22	37,29
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 4 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden berusia antara 25 – 29 tahun atau berada pada usia yang produktif. Hal ini sesuai dengan persyaratan menjadi CPNSD bahwa usia minimal peserta umum adalah 18 tahun dan usia maksimal adalah 35 tahun. Adanya produktivitas tingkat usia CPNSD, diharapkan mereka dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan bidang pekerjaan pada instansi masing-masing dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat (Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Juli 2010)

3. Identitas Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui identitas responden menurut pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Identitas Responden Menurut Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana Strata I (S1)	42	71,19
2	Diploma III (D3)	17	28,81
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 5 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan Sarjana Strata I atau berpendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan persyaratan menjadi CPNSD bahwa pendidikan minimal peserta umum adalah Diploma III, Sarjana Strata I dan II. Tingginya jenjang pendidikan yang disyaratkan pada penerimaan CPNSD dimaksudkan agar para CPNSD akan dapat bekerja secara profesional dan maksimal sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Selain itu diharapkan mereka mampu mengaplikasikan atau menerapkan disiplin ilmu yang didapatkan selama kuliah pada pekerjaannya masing-masing (Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Juli 2010)

4. Identitas Responden Menurut Bidang Tugas

Untuk mengetahui identitas responden menurut bidang tugas dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Identitas Responden Menurut Bidang Tugas

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Tenaga Kesehatan	9	15,25
2	Tenaga Teknis	43	72,88
3	Pelatih/Olahragawan Berprestasi	7	11,86
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 6 di atas maka diketahui sebagian besar responden memiliki bidang tugas sebagai tenaga teknis. Dalam penerimaan CPNSD Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Lampung hanya memerlukan formasi CPNSD dengan jabatan tenaga kesehatan, tenaga teknis dan pelatih/olahragawan berprestasi. Penerimaan CPNSD dengan berbagai jabatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memenuhi berbagai formasi yang kosong pada bidang tugas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diharapkan para CPNSD yang diterima adalah mereka yang memenuhi kriteria dan persyaratan, sehingga dapat bekerja secara maksimal setelah dinyatakan resmi menjadi CPNSD melalui Surat Keputusan Pengangkatan CPNSD.

Tenaga kesehatan terdiri dari Dokter umum dan dokter spesialis, perawat, bidan, pranata laboratorium kesehatan, perekam medik, nutrisisionis, asisten apoteker, apoteker, okupasi terapis, penyuluh kesehatan masyarakat, teknisi elektromedik.

Tenaga teknis terdiri dari Pranata Laporan Keuangan, Auditor, Inspektur Tambang, Pengolah Data Pertambangan, Penyuluh Perikanan, Penyusun Program dan Evaluasi, Stastisi, Penyuluh Koperasi, Pemandu Wisata, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Mutu Pakan, Penyuluh Kehutanan, Pranata Laboratorium, Pranata Humas, Pengawas Benih Tanaman, Analisis Kepegawaian, Penera, Teknisi Pertamanan dan Pranata Komputer. Sementara itu, pelatih/olahragawan berprestasi terdiri dari Atletik, Gulat, Tinju, Karate, Kempo, Pencak Silat, Taekwondo, Renang, Tarung Drajat, Angkat Besi/Berat, Anggar, Dayung, Judo.

(Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010).

B. Tanggapan CPNSD terhadap Praktik Primordialisme dalam Penerimaan CPNSD Provinsi Lampung Tahun 2009

Primordialisme adalah suatu pandangan yang lebih mengutamakan atau mementingkan orang-orang yang berada dalam ikatan kekeluargaan atau kekerabatan dalam segala hal. Dalam konteks penerimaan CPNSD praktik primordialisme dilakukan pejabat atau pemerintahan dengan mengutamakan atau memprioritaskan pihak kerabat/keluarga untuk menjadi PNS.

1. Tanggapan Terhadap Penerimaan CPNSD

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa penerimaan CPNSD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2009 dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Tanggapan Terhadap Penerimaan CPNSD

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	9	15,25
2	Cukup Baik	22	37,29
3	Kurang Baik	28	47,46
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 1. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 7 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa penerimaan CPNSD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2009 dilaksanakan kurang baik. Kurang baik maksudnya adalah secara ideal penerimaan CPNSD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil bahwa CPNS harus mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan, namun pada kenyataannya masih ada kasus primordialisme . Pengadaan CPNSD menjadi Kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal penerimaan pegawai adalah dilakukan secara terbuka dan transparan. Penerimaan pegawai dilakukan melalui proses pengujian atau tes yang meliputi tes potensi akademik dan tes kemampuan bakat skolastik sesuai dengan bidang ilmu pelamar.

Selain itu responden menyatakan bahwa penerimaan CPNSD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2009 dilaksanakan dengan cukup baik, dalam arti bahwa responden menilai adanya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan tes seperti pada saat pendaftaran misalnya ada pelamar yang tidak memenuhi persyaratan umur atau bidang ilmu yang tidak sesuai

dengan jabatan yang dibutuhkan. Adanya responden yang menyatakan bahwa penerimaan CPNSD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2009 dilaksanakan dengan kurang baik, karena panitia penerimaan CPNSD dianggap kurang atau tidak profesional dalam menyelenggarakan tes, misalnya adanya dugaan kecurangan pada penerimaan tes.

2. Tanggapan terhadap Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan dalam Penerimaan CPNSD

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa latar belakang pendidikan pelamar yang disyaratkan dalam Penerimaan CPNSD pada Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2009 sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan, dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Tanggapan terhadap Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan dalam Penerimaan CPNSD

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sesuai	30	50,85
2	Cukup Sesuai	22	37,29
3	Kurang Sesuai	7	11,86
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 2. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 8 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa latar belakang pendidikan pelamar yang disyaratkan dalam Penerimaan CPNSD sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan. Kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan dalam penerimaan CPNSD merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan, mengingat dengan adanya kesesuaian tersebut maka

diharapkan para CPNSD akan dapat bekerja secara maksimal dengan dasar ilmu yang telah mereka miliki. Dengan kata lain pendidikan yang relevan adalah persyaratan penting dalam penerimaan CPNSD. Contoh formasi yang sesuai adalah Formasi Auditor berasal dari Jurusan S1 Akuntansi, yang cukup sesuai adalah Pranata Humas berasal dari Jurusan Komunikasi Publistik (lebih sesuai Jurusan S1/DIII Humas) sedangkan yang tidak sesuai adalah Penyuluh Kesehatan Masyarakat berasal dari Pendidikan S1 Pertambangan (seharusnya S1 Kesehatan Masyarakat).

3. Tanggapan Terhadap Profesionalisme Panitia Penerimaan CPNSD

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa panitia Penerimaan CPNSD pada Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2009 telah menjalankan tugasnya secara profesional, dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Tanggapan Terhadap Profesionalisme Panitia Penerimaan CPNSD

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Profesional	19	32,20
2	Cukup Profesional	15	25,42
3	Kurang Profesional	25	42,37
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 3. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 9 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa panitia Penerimaan CPNSD menjalankan tugasnya dengan kurang profesional, dalam arti artinya responden menilai masih ada bentuk kecurangan yang terdapat dari tahap pendaftaran sampai dengan

pengumuman. Panitia Penerimaan CPNSD menjalankan tugasnya dengan profesional, artinya panitia bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pengumuman. Adanya responden yang menyatakan tidak profesional dapat disebabkan adanya dugaan panitia Penerimaan CPNSD menjalankan tugasnya dengan kurang profesional, artinya banyak dijumpai kecurangan dari tahap pendaftaran sampai dengan pengumuman, seperti jurusan tidak sesuai formasi atau usia pelamar melebihi 35 tahun.

4. Tanggapan Terhadap Potensi Kecurangan dalam Penerimaan CPNSD

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap potensi kecurangan dalam Penerimaan CPNSD pada Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2009, dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10 Tanggapan Terhadap Potensi Kecurangan dalam Penerimaan CPNSD

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Besar	26	44,07
2	Cukup Besar	21	35,59
3	Kecil	12	20,34
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 4. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 10 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa potensi kecurangan dalam Penerimaan CPNSD adalah besar. Hal ini bermakna bahwa pada Penerimaan CPNSD pada Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2009 terdapat potensi kecurangan seperti

penerimaan pegawai yang melebihi batas usia yang ditentukan, adanya pelamar yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan adanya pelamar yang tidak mengikuti tes CPNSD, namun dinyatakan lulus pada saat pengumuman.

5. Tanggapan Terhadap Potensi Kecurangan berupa Primordialisme

Untuk mengetahui tanggapan secara khusus potensi kecurangan dalam Penerimaan CPNSD pada Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2009, dalam bentuk praktik primordialisme, dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Tanggapan Terhadap Potensi Kecurangan berupa Primordialisme

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Besar	24	40,68
2	Cukup Besar	24	40,68
3	Kecil	11	18,64
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 5. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 11 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa potensi kecurangan dalam Penerimaan CPNSD pada Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2009 adalah besar dan cukup besar. Besar atau cukup besarnya potensi primordialisme dalam penerimaan CPNSD ini dapat diketahui responden dari berbagai sumber, misalnya pemberitaan melalui media massa tentang adanya potensi primordialisme, pengalaman pada saat mereka mengikuti tes pada tahun-tahun sebelumnya atau dari orang lain yang menceritakan pada mereka bahwa memang ada praktik

primordialisme dalam penerimaan CPNSD. Praktik primordialisme ini sangat disayangkan dalam penerimaan CPNSD, sebab seharusnya Pemerintah Daerah merekrut calon pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bekerja.

Contoh pemberitaan mengenai adanya praktik primordialisme dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Provinsi Lampung Tahun 2009 adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, di mana salah seorang peserta bernama Ganda Febriansyah yang lulus pada Formasi Tata Praja Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pada seleksi CPNSD Tahun 2008, Ganda Febriansyah pernah menjalani proses hukum karena kasus perjkorian dalam seleksi CPNSD (Sumber: *Radar Lampung* Edisi 31 Desember 2009).

Kasus lain adanya dugaan primordialisme dalam Penerimaan CPNSD terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, di mana tiga orang peserta bernama Fadho Riyansyah, Sri Lidia dan Erma Juwita yang diduga tidak mengikuti ujian penerimaan pada 29 November 2009 tetapi dinyatakan lulus pada Formasi Analisis Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Sumber: *Tribun Lampung* Edisi 9 Januari 2010).

6. Nuansa Kecurangan dalam Proses Pendaftaran

Untuk mengetahui bahwa responden merasakan adanya nuansa kecurangan dalam bentuk primordialisme dalam proses pendaftaran CPNSD, dapat dilihat pada tabel 12 berikut:

Tabel 12. Nuansa Kecurangan dalam Proses Pendaftaran

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Merasakan	30	50,85
2	Cukup Merasakan	21	35,59
3	Kurang Merasakan	8	13,56
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 6. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 12 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden merasakan adanya nuansa kecurangan dalam bentuk primordialisme dalam proses pendaftaran CPNSD. Nuansa kecurangan tersebut dapat dirasakan misalnya ada seseorang yang diduga kerabat atau anggota keluarga pejabat Pemerintahan (setingkat Kepala Dinas) yang tidak mengikuti tes, namun pada saat pengumuman, namanya tercantum sebagai CPNSD yang dinyatakan lulus tes, selain itu adanya praktik perjokian yang dilakukan oleh seseorang atas perintah seseorang peserta tes yang diduga sebagai kerabat atau anggota keluarga pejabat Pemerintah Provinsi Lampung. Meskipun Panitia Pelaksana menyatakan bahwa penerimaan dilakukan secara bersih dan transparan, namun tetap saja para peserta tes merasakan nuansa kecurangan dan secara psikologis memiliki kecurigaan, hal ini disebabkan karena formasi yang ditawarkan terbatas sedangkan jumlah peserta banyak (Sumber: Wawancara dengan Andri Firmansyah, responden penelitian Tahun 2010).

7. Nuansa Kecurangan dalam Proses Test/Ujian

Untuk mengetahui bahwa responden merasakan adanya nuansa kecurangan dalam bentuk primordialisme dalam proses test/ujian untuk menjadi CPNSD, dapat dilihat pada tabel 13 berikut:

Tabel 13. Nuansa Kecurangan dalam Proses Test/Ujian

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Merasakan	31	52,54
2	Cukup Merasakan	22	37,29
3	Kurang Merasakan	6	10,17
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 7. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 13 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden merasakan adanya nuansa kecurangan dalam bentuk primordialisme dalam proses tes/ujian CPNSD. Nuansa kecurangan pada saat pelaksanaan tes, dapat diketahui misalnya ada seseorang peserta tes yang mengerjakan soal-soal ujian dalam waktu yang sangat cepat, padahal jumlah soal yang diujikan banyak (mencapai 250 butir soal), namun pada saat pengumuman, peserta tersebut dinyatakan lulus. Hal ini menunjukkan bahwa ada peserta tes yang mengikuti tes hanya sebagai formalitas semata-mata, untuk menutupi kecurigaan berbagai pihak, sebab dengan mengikuti tes maka kecurigaan orang lain akan dapat diminimalisasi oleh peserta yang diterima sebagai CPNSD melalui praktik primordialisme (Sumber: Wawancara dengan Andri Firmansyah, responden penelitian Tahun 2010).

8. Nuansa Kecurangan dalam Proses Pengumuman

Untuk mengetahui bahwa responden merasakan adanya nuansa kecurangan dalam pengumuman CPNSD, dapat dilihat pada tabel 14 berikut:

Tabel 14. Nuansa Kecurangan dalam Proses Pengumuman

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Merasakan	32	54,24
2	Cukup Merasakan	19	32,20
3	Kurang Merasakan	8	13,56
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 8. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 14 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden merasakan adanya nuansa kecurangan dalam bentuk primordialisme dalam proses pengumuman kelulusan CPNSD. Kecurangan pada saat pengumuman dapat diketahui misalnya seseorang yang diduga kerabat pejabat pemerintahan yang tidak mengikuti tes namun dinyatakan lulus dalam pengumuman. Dugaan bahwa adanya seseorang yang tidak mengikuti tes namun dinyatakan lulus tersebut merupakan kuatnya indikasi bahwa praktik primordialisme memang benar-benar terjadi dalam penerimaan CPNSD (Sumber: Wawancara dengan Novita Sari, responden penelitian Tahun 2010).

9. Tanggapan Terhadap Kekentalan Praktik Primordialisme

Untuk mengetahui tanggapan penilaian responden terhadap kekentalan praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD, dapat dilihat pada tabel 15 berikut:

Tabel 15. Tanggapan Terhadap Kekentalan Praktik Primordialisme

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Kental	33	55,93
2	Cukup Kental	22	37,29
3	Kurang Kental	4	6,78
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 9. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD adalah kental. Hal ini ketahu dari adanya penilaian para responden yang menyatakan bahwa ada kemungkinan yang sangat besar bagi pejabat pemerintahan untuk mengutamakan para pelamar yang masih terikat dalam hubungan keluarga, sebagai peserta yang lulus dalam penerimaan CPNSD. Jawaban responden yang menyatakan bahwa penerimaan CPNSD kental dengan primordialisme menunjukkan bahwa praktik ini terjadi secara jelas, misalnya dari sebanyak 30 CPNSD yang dibutuhkan pada jabatan tertentu, sebanyak 20 orang di antaranya adalah titipan pejabat. Jawaban cukup kental misalnya dari sebanyak 30 CPNSD yang dibutuhkan pada jabatan tertentu, sebanyak 15 orang di antaranya adalah titipan pejabat. Kurang kental misalnya dari sebanyak 30 CPNSD yang dibutuhkan pada jabatan tertentu, sebanyak 1-5 orang di antaranya adalah titipan pejabat.

10. Tanggapan bahwa Otonomi Daerah Berpotensi Menciptakan Praktik Primordialisme

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa otonomi daerah berpotensi menjadi lahan subur bagi berkembangnya praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD, dapat dilihat pada tabel 16 berikut:

Tabel 16. Tanggapan bahwa Otonomi Daerah Berpotensi Menciptakan Praktik Primordialisme

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berpotensi	31	52,54
2	Cukup Berpotensi	22	37,29
3	Kurang Berpotensi	6	10,17
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 10. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 16 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa otonomi daerah berpotensi menjadi lahan subur bagi berkembangnya praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD. Hal ini sesuai dengan pandangan para responden yang menyatakan bahwa otonomi daerah pada saat ini telah mengalami pergeseran pandangan, di mana para pejabat pemerintahan di daerah cenderung menjadi penguasa lokal yang berhak untuk menentukan siapa-siapa orang yang akan direkrut menjadi CPNSD, terutama para pelamar tes yang masih terikat sebagai anggota keluarga atau kerabat dari pejabat pemerintahan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pandangan para responden yang menyatakan bahwa otonomi daerah pada saat ini telah mengalami pergeseran pandangan, di mana para pejabat pemerintahan di daerah, sebagai oknum yang menjadikan

otonomi daerah sebagai lahan subur bagi tumbuhnya primordialisme cenderung menjadi penguasa lokal yang berhak untuk menentukan siapa-siapa orang yang akan direkrut menjadi CPNSD, terutama para pelamar tes yang masih terikat sebagai anggota keluarga atau kerabat dari pejabat pemerintahan.

Secara ideal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

11. Dampak Praktik Primordialisme bagi Seluruh Peserta Tes

Untuk mengetahui penilaian responden mengenai dampak praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD bagi keseluruhan peserta tes, dapat dilihat pada tabel 17 berikut:

Tabel 17. Dampak Praktik Primordialisme bagi Seluruh Peserta Tes

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Merugikan	46	77,97
2	Cukup Merugikan	13	22,03
3	Kurang Merugikan	0	0,00
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 11. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 17 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD merugikan keseluruhan peserta tes. Hal ini bermakna bahwa pada dasarnya praktik primordialisme sangat merugikan seluruh peserta tes, sebab pada umumnya peserta tes mengharapkan penerimaan CPNSD dilaksanakan secara transparan dan jujur tanpa ada kecurangan atau penyalahgunaan wewenang para pejabat pemerintahan daerah. Apabila hal tersebut terjadi maka para peserta tes, yang sebagian besar adalah masyarakat umum akan merasa sangat dirugikan oleh praktik primordialisme ini.

Jawaban merugikan mengandung makna bahwa peserta tes yang berasal dari pelamar umum sudah banyak mengorbankan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk mengikuti tes secara sungguh-sungguh tetapi harapan mereka hilang

karena adanya pelamar yang diterima melalui praktik primordialisme. Jawaban cukup merugikan mengandung makna bahwa peserta tes yang berasal dari pelamar umum cukup mengorbankan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk mengikuti tes secara sungguh-sungguh tetapi harapan mereka hilang karena adanya pelamar yang diterima melalui praktik primordialisme.

12. Perlakuan Terhadap CPNSD yang Diterima Karena Primordialisme

Untuk mengetahui penilaian responden tentang perlakuan terhadap pelamar yang diterima sebagai CPNSD dengan menggunakan praktik primordialisme, dapat dilihat pada tabel 18 berikut:

Tabel 18. Perlakuan Terhadap CPNSD yang Diterima Karena Primordialisme

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Harus dibatalkan dan diberi sanksi hukum	30	50,85
2	Diberi pembinaan melalui instansi	22	37,29
3	Diawasi selama menjadi PNS	7	11,86
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 12. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 18 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa pelamar yang diterima sebagai CPNSD dengan menggunakan praktik primordialisme harus dibatalkan dan diberi sanksi hukum. Hal ini menunjukkan adanya keinginan sebagian besar responden agar para peserta yang dinyatakan lulus adalah mereka yang benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian pada bidang pekerjaan dan lulus melalui tes yang dilaksanakan, sehingga apabila ada peserta yang lulus karena praktik primordialisme maka mereka mengharapkan agar peserta tersebut dibatalkan

kelulusannya dan diberi sanksi secara hukum, agar menjadi penerimaan CPNSD adalah proses rekrutmen yang jujur, bersih dan transparan.

Berdasarkan uraian mengenai tanggapan CPNSD terhadap adanya praktik primordialisme tersebut, dapat diidentifikasi bahwa ada praktik primordialisme dalam penerimaan CPNSD pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009. Hal ini didasarkan pada sebaran data yang menunjukkan frekuensi dan persentase jawaban responden yang menunjukkan jawaban terbesar terdapat pada pilihan jawaban A dan B.

C. Pengaruh Praktik Primordialisme Terhadap Profesionalisme Kerja PNS

Pengaruh primordialisme pada profesionalisme kerja PNS meliputi perpormansi pegawai, akuntabilitas pegawai, responsibilitas pegawai, loyalitas pegawai dan kemampuan pegawai.

1. Pengaruh Primordialisme Terhadap Kompetensi PNS

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kompetensi PNS yang diterima melalui praktik primordialisme, dapat dilihat pada tabel 19 berikut:

Tabel 19. Tanggapan Responden Terhadap Kompetensi PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Memiliki kecakapan dan kehandalan	12	20,34
2	Cukup memiliki kecakapan dan kehandalan	19	32,20
3	Kurang memiliki kecakapan dan kehandalan	28	47,46
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 13. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 19 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang memiliki kecakapan dan kehandalan dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa para CPNSD diterima melalui praktik primordialisme, tidak dapat memiliki kecakapan dan kehandalan dalam bekerja. Seharusnya pekerjaan mereka sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, selain itu kecakapan dalam bekerja dapat diperoleh melalui proses pembelajaran ketika mereka telah bekerja sebagai PNS atau melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai.

Hal di atas menunjukkan bahwa apabila PNS tidak memiliki kompetensi dalam bekerja maka akan berdampak pada kemunduran organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Sedarmayanti (2001: 42), sumber daya manusia merupakan aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi sehingga tidak seperti mesin, uang dan material yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai serta diatur sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi.

2. Pengaruh Primordialisme Terhadap Produk Kerja PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai PNS secara berkualitas, dapat dilihat pada tabel 20 berikut:

Tabel 20. Tanggapan Terhadap Kualitas Pekerjaan PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat bekerja secara berkualitas	9	15,25
2	Cukup Dapat bekerja secara berkualitas	21	35,59
3	Kurang Dapat bekerja secara berkualitas	29	49,15
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 14. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 20 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat melaksanakan pekerjaannya secara berkualitas. Hal ini dapat disebabkan karena sikap para PNS yang meremehkan pekerjaan mereka, dengan dalih bahwa meskipun mereka bekerja secara tidak berkualitas mereka tidak akan dikenakan sanksi karena ada dukungan dari pejabat pemerintahan yang masih terikat dalam anggota keluarga atau kerabat mereka (Sumber: Wawancara dengan Novita Sari, responden penelitian Tahun 2010).

Hal di atas menunjukkan bahwa praktik primordialisme sangat tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, yang menuntut setiap PNS sebagai aparatur daerah untuk bisa bekerja secara berkualitas sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab mereka masing-masing.

3. Pengaruh Primordialisme Terhadap Prestasi Kerja PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat meraih prestasi kerja sebagai PNS, dapat dilihat pada tabel 21 berikut:

Tabel 21. Tanggapan Terhadap Prestasi Kerja PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat berprestasi	9	15,25
2	Cukup dapat berprestasi	22	37,29
3	Kurang dapat berprestasi	28	47,46
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 15. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 21 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat meraih prestasi kerja sebagai PNS. Hal ini berkaitan dengan sikap PNS yang menganggap bahwa pekerjaan sebagai PNS dapat diraih dengan mudah tanpa harus bersusah payah mengikuti segala prosedur sebagaimana dilakukan para pelamar pada umumnya, sehingga dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam bekerja, yaitu bekerja tanpa tujuan untuk mencapai prestasi, sebab menurut mereka prestasi kerja nantinya akan tetap dapat diraih dengan adanya rekomendasi atau perintah dari pejabat yang menjadi anggota keluarga mereka (Sumber: Wawancara dengan Novita Sari, responden penelitian Tahun 2010).

Perbaikan kualitas aparatur pemerintah, harus dimulai sejak rekrutmen dengan menggunakan sistem yang menjamin diperolehnya sumber daya yang memang mempunyai kualitas dasar yang baik, pembinaan melalui penugasan yang mendidik, pengembangan program pelatihan yang memungkinkan tersedianya tenaga siap pakai, peningkatan kesejahteraan yang memadai, dan

pemberian jaminan hari tua. Kebijakan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional memerlukan definisi yang jelas tentang kualifikasi profesionalisme yang ingin dicapai pada berbagai bidang tugas. Otonomi daerah pada dasarnya akan terselenggara dengan baik apabila didukung oleh faktor-faktor seperti tersedianya sumber daya yang berkualitas baik itu sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam pelaksanaan otonomi daerah (Rasyid, 2000: 40-41).

4. Pengaruh Primordialisme Terhadap Tanggung Jawab PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme pada Pekerjaan

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat melaksanakan semua pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dapat dilihat pada tabel 22 berikut:

Tabel 22. Tanggapan Terhadap Tanggung Jawab PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme pada Pekerjaan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat Bertanggung Jawab	15	25,42
2	Cukup dapat Bertanggung Jawab	21	35,59
3	Kurang dapat Bertanggung Jawab	23	38,98
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 16. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 22 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan cara mereka untuk mejadi CPNSD, sehingga tanggung jawab mereka pun menjadi rendah atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab secara penuh. Padahal tanggung jawab dalam hal

pekerjaan merupakan aspek yang sangat diperlukan dari pribadi seorang PNS, dalam kapasitasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Menurut Siagian (1996: 182), pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya lainnya atau setidaknya pengolahan dan pemakaian sumber daya organisasi dapat secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak bagi suatu organisasi dalam menghadapi tuntutan tugas dan mencapai tujuan organisasi.

5. Pengaruh Primordialisme Terhadap Tanggung Jawab PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme pada Atasan

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya baik kepada atasan maupun, dapat dilihat pada tabel 23 berikut:

Tabel 23. Tanggapan Terhadap Tanggung Jawab PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme pada Atasan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat Bertanggung Jawab	16	27,12
2	Cukup dapat Bertanggung Jawab	20	33,90
3	Kurang dapat Bertanggung Jawab	23	38,98
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 17. Data Primer Tahun 2010 Berdasarkan tabel 23 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada atasan. Hal ini menunjukkan bahwa CPNSD tersebut lebih memprioritaskan tanggung jawab

secara formal pada atasan dibandingkan pada penyelesaian pekerjaan secara berkualitas, karena mereka menganggap bahwa pejabat pemerintah provinsi sebagai kerabat mereka, telah menitipkan mereka kepada atasannya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang diterima sebagai CPNSD melalui praktik primordialisme pada dasarnya tidak mengganggu pekerjaan yang harus dipertanggung jawabkan secara penuh kepada masyarakat, tetapi mereka cenderung lebih mementingkan cara untuk dekat dengan atasan atas dasar kekerabatannya dengan pejabat pemerintah daerah.

Menurut Notoatmodjo (1998: 2-3), dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian, sehingga dapat memegang tanggung jawab di masa yang akan datang.

6. Pengaruh Primordialisme Terhadap Pelayanan PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme kepada Masyarakat

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat melayani masyarakat secara baik dan maksimal, dapat dilihat pada tabel 24 berikut:

Tabel 24. Tanggapan Terhadap Pelayanan PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme kepada Masyarakat

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat melayani masyarakat dengan baik	17	28,81
2	Cukup dapat melayani masyarakat dengan baik	19	32,20
3	Kurang dapat melayani masyarakat dengan baik	23	38,98
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 18. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 24 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa para CPNSD tidak dapat secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebab mereka menganggap pekerjaan sebagai PNS hanyalah sebuah rutinitas semata-mata, tanpa disiplin dan moral kerja yang baik. Dampak yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan pekerjaan semacam ini adalah hasil yang tidak maksimal, yang secara perlahan-lahan akan dapat mengganggu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat ia ditugaskan atau melaksanakan pekerjaan.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan hakikat PNS sebagai orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku (Lembaga Administrasi Negara, 1998).

7. Pengaruh Primordialisme Terhadap Prioritas Pengabdian PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme kepada Masyarakat

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme dapat bekerja dengan prioritas pengabdian kepada masyarakat dengan baik, dapat dilihat pada tabel 25 berikut:

Tabel 25. Tanggapan Terhadap Prioritas Pengabdian PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme kepada Masyarakat

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Memiliki prioritas pengabdian	16	27,12
2	Cukup memiliki prioritas pengabdian	19	32,20
3	Kurang memiliki prioritas pengabdian	24	40,68
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 19. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 25 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat memprioritaskan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa para CPNSD tersebut tidak mampu menempatkan dan merealisasikan kedudukan mereka sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, karena cara mereka mendapatkan pekerjaan sebagai PNS tidak melalui perjuangan yang panjang, namun didapatkan dengan cara yang mudah melalui praktik primordialisme.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (1998), PNS berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kesetiaan dan ketaatan yang penuh tersebut mengandung pengertian bahwa PNS berada sepenuhnya di bawah pemerintah

8. Pengaruh Primordialisme Terhadap Ketidakmampuan dalam Menerima Kritik dan Aspirasi

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme dapat menerima kritik, saran dan aspirasi dari pihak lain (atasan, rekan kerja maupun publik), dapat dilihat pada tabel 26 berikut:

Tabel 26. Tanggapan Bahwa PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme dapat Menerima Kritik dan Aspirasi

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat menerima kritik dan saran	18	30,51
2	Cukup dapat menerima kritik dan saran	19	32,20
3	Kurang dapat menerima kritik dan saran	22	37,29
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 20. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 26 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat menerima kritik dan saran dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa para CPNSD tersebut tidak mampu menerima kritik dan saran yang untuk perbaikan prestasi dan kinerja mereka sebagai PNS. Mereka lebih mengutamakan rekomendasi dari pejabat yang menjadi keluarga mereka. Hal ini sangat disayangkan, sebab dalam iklim demokratisasi lokal dan otonomi daerah, seharusnya PNS adalah sosok orang-orang yang dapat memberikan kontribusi positif dalam otonomi daerah. Profesionalisme pegawai sangat penting sebagai kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional (Tjokrowinoto, 1996: 191).

9. Pengaruh Primordialisme Terhadap Loyalitas CPNSD pada Pekerjaan

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat bersifat loyal pada pekerjaannya, dapat dilihat pada tabel 27 berikut:

Tabel 27. Tanggapan Bahwa PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme dapat Bersifat Loyal pada Pekerjaan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat bersifat loyal	16	27,12
2	Cukup dapat bersifat loyal	18	30,51
3	Kurang dapat bersifat loyal	25	42,37
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 21. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 27 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat bersifat loyal pada pekerjaan. Kurang loyalnya para CPNSD tersebut pada pekerjaan sebab mereka merasa tidak memerlukan perjuangan secara maksimal untuk meraih atau mendapatkan pekerjaan tersebut, karena cukup mendapatkan rekomendasi dari pejabat pemerintahan dan mereka bisa menjadi CPNSD. Hal ini sangat disayangkan sebab loyalitas pada pekerjaan merupakan dasar pembentukan tanggung jawab secara penuh seseorang pada pekerjaannya. Artinya, apabila seseorang menganggap pekerjaan sebagai tugas yang harus diemban, maka semestinya ia akan melakukan hal-hal yang terbaik dan maksimal untuk melaksanakan tugas tersebut dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga atau instansi tempat ia bekerja.

10. Pengaruh Primordialisme Terhadap Loyalitas CPNSD pada Rekan Kerja

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat bersifat loyal pada sesama rekan kerja, dapat dilihat pada tabel 28 berikut:

Tabel 28. Tanggapan Bahwa PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme dapat Bersifat Loyal pada Rekan Kerja

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat bersifat loyal	16	27,12
2	Cukup dapat bersifat loyal	15	25,42
3	Kurang dapat bersifat loyal	28	47,46
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 22. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 28 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat bersifat loyal pada rekan kerja. Hal ini dapat disebabkan karena CPNSD tersebut merasa lebih istimewa dibandingkan dengan rekan kerja mereka yang belum tentu memiliki kerabat yang memiliki jabatan penting pada Pemerintahan Provinsi. Rekan kerja merupakan partner bagi seseorang di dalam organisasi, karena ia setiap hari harus berinteraksi, berhubungan, saling membutuhkan, saling ketergantungan dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dalam rangka menyelesaikan pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sedarmayanti (2000: 53), setiap aparatur harus mampu menampilkan loyalitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan. Loyalitas ini tidak memandang tingkatan kepada siapa diberikan. Prioritas diberikan kepada kewajibannya sebagai aparatur. Loyalitas berkaitan dengan kemampuan mempertanggung jawabkan tugas pekerjaan, daya tanggap. Selain itu loyalitas tidak membedakan pemberian pelayanan atas dasar golongan tertentu.

11. Pengaruh Primordialisme Terhadap Loyalitas CPNSD pada Atasan

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat bersifat loyal pada atasan, dapat dilihat pada tabel 29 berikut:

Tabel 29. Tanggapan Bahwa PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme dapat Bersifat Loyal pada Atasan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat bersifat loyal	13	22,03
2	Cukup dapat bersifat loyal	22	37,29
3	Kurang dapat bersifat loyal	24	40,68
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 23. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 29 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat bersifat loyal pada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat berkaitan dengan dengan anggapan CPNSD tersebut bahwa ia adalah titipan pejabat kepada atasannya, sehingga ia cukup bersifat loyal dan menghargai atasannya tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dari hakikat dan

kedudukan seorang PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sebab seharusnya PNS harus mementingkan kepentingan negara dan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Apalagi jika seorang PNS mengutamakan kepentingan pribadi atas dasar kedekatannya dengan pejabat pemerintahan, tentunya ia tidak akan dapat bekerja secara optimal dan profesional.

Menurut Sedarmayanti (2000: 53), loyalitas aparatur yang berkaitan dengan karakteristik sosok profesionalisme adalah kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.

12. Pengaruh Primordialisme Terhadap Sikap Kerja

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat memiliki sikap kerja yang baik dalam melaksanakan pekerjaan, dapat dilihat pada tabel 30 berikut:

Tabel 30. Tanggapan Bahwa PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme dapat Memiliki Sikap Kerja Yang Baik

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Memiliki sikap kerja yang baik	17	28,81
2	Cukup memiliki kerja yang baik	20	33,90
3	Kurang memiliki sikap kerja yang baik	22	37,29
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 24. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 30 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat memiliki sikap kerja yang baik. Hal ini dapat dipahami sebab sikap dalam bekerja adalah proses yang dapat dipelajari oleh para CPNSD sehingga meskipun ia diterima dengan praktik primordialisme ia tetap mampu mencerminkan sikap kerja yang baik di dalam melaksanakan pekerjaannya.

13. Pengaruh Primordialisme Terhadap Kemampuan Kerja

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan, dapat dilihat pada tabel 31 berikut:

Tabel 31. Tanggapan Bahwa PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme Memiliki Kemampuan Kerja Memadai

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Memiliki kemampuan yang memadai	13	22,03
2	Cukup memiliki kemampuan yang memadai	17	28,81
3	Kurang memiliki kemampuan yang memadai	29	49,15
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 25. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 31 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang memiliki kemampuan kerja yang memadai, karena berkaitan dengan proses belajar dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu para CPNSD tersebut pada dasarnya adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi sehingga kemampuan menyesuaikan dirinya pun dapat menjadi

lebih cepat sesuai dengan lamanya mereka menjadi PNS. Kemampuan kerja yang baik seharusnya disertai dengan tanggung jawab yang baik pula, sebab tidak ada gunanya seseorang bisa melakukan pekerjaan tetapi tidak memiliki tanggung jawab yang optimal pada pekerjaannya tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2000: 54), kemampuan aparatur merupakan kesanggupan melaksanakan tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia. Dengan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa keterampilan lebih banyak menggunakan unsur anggota badan dari pada unsur lain, seperti otot, saraf, perasaan dan pikiran, dengan kombinasi yang berbeda dari masing-masing unsur, tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan

14. Pengaruh Primordialisme Terhadap Efektifitas dan Efisiensi Kerja

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme akan dapat melaksanakan semua pekerjaannya secara efektif dan efisien serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya, dapat dilihat pada tabel 32 berikut:

Tabel 32. Tanggapan Bahwa PNS yang Diterima Melalui Praktik Primordialisme dapat Bekerja Secara Efektif dan Efisien

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat bekerja secara efektif dan efisien	15	25,42
2	Cukup dapat bekerja secara efektif dan efisien	20	33,90
3	Kurang dapat bekerja secara efektif dan efisien	24	40,68
Jumlah		59	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner Penelitian Nomor 26. Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tabel 32 di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme kurang dapat bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini berkaitan dengan proses diterimanya mereka sebagai PNS dengan cara yang mudah dan instan dibandingkan dengan para pelamar lain pada umumnya, sehingga mereka menganggap pekerjaan tersebut hanyalah sebuah formalitas dan rutinitas yang mereka jalani tanpa harus mementingkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Akibatnya adalah CPNSD yang diterima melalui praktik primordialisme tidak dapat mengimplementasikan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari

Menurut Tjokrowinoto (1996: 191), profesionalisme adalah kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.

D. Pembahasan

Untuk mengetahui pengaruh praktik primordialisme dalam penerimaan CPNSD terhadap profesionalisme kerja pegawai dalam penelitian ini digunakan analisis Koefisien Penentu dengan dasar perhitungan rumus Korelasi *Product Moment* sebagai berikut:

$$R_{xy} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum X^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

Diketahui :

$$\begin{aligned} \sum X &= 1207 \\ \sum Y &= 1204 \\ \sum X^2 &= 48661 \\ \sum Y^2 &= 48388 \\ \sum XY &= 48510 \\ N &= 59 \end{aligned}$$

Dengan mengacu pada rumus tersebut di atas, maka data yang ada dimasukkan dengan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} r_{xy} &= \frac{\sum xy - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right\}}} \\ r_{xy} &= 48510 - \frac{(1207)(1204)}{59} \\ &\quad \sqrt{\left\{ 48661 - \frac{(1207)^2}{59} \right\} \left\{ 48388 - \frac{(1204)^2}{59} \right\}} \end{aligned}$$

$$r_{xy} = \frac{48510 - 48440.9}{\sqrt{(48661 - 48561,6)(48388 - 48320,5)}}$$

$$r_{xy} = \frac{69,1}{\sqrt{(99,4)(67,5)}}$$

$$r_{xy} = \frac{69,1}{78,9}$$

$$r_{xy} = 0,876$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa besarnya hubungan (r) antara praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD dengan rendahnya profesionalisme kerja PNS adalah sebesar 0.876 atau 87,6%. Dengan kata lain, rendahnya profesionalisme kerja PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung berhubungan dengan praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD dengan nilai 87,6%.

Sementara itu besarnya nilai pengaruh (r^2) didapatkan dengan mengkuadratkan nilai hubungan (r) yang diperoleh, yaitu $0.876^2 = 0.767$. Hal ini berarti besarnya pengaruh praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD terhadap rendahnya profesionalisme kerja PNS adalah 0.767 atau 76,7%.

Selanjutnya untuk mengetahui keeratan tingkat pengaruh praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD terhadap rendahnya profesionalisme kerja PNS, maka nilai yang telah didapat dibandingkan dalam koefisien interpretasi menurut Suharsimi Arikunto (2000: 132). Hasil perbandingan menunjukkan bahwa 0.767 berada pada skala 0.601 - 0.800 dengan interpretasi tinggi. Hal ini bermakna bahwa praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap rendahnya profesionalisme kerja PNS. Dengan kata

lain, seseorang yang diterima menjadi CPNSD melalui praktik primordialisme akan memiliki profesionalisme kerja yang sangat rendah.

Uji pengaruh dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Uji t, dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Berdasarkan rumus di atas maka nilai t_{hitung} adalah:

$$t = \frac{0,876\sqrt{59-2}}{\sqrt{1-0,876^2}} = \frac{0,876\sqrt{57}}{\sqrt{1-0,767}} = \frac{0,876 \cdot 7,549}{\sqrt{0,232}} = \frac{6,612}{0,232} = 28,430$$

Setelah itu nilai t_{hitung} dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 95%,

Ketentuan yang dipakai dalam perbandingan ini adalah :

- a. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ pada taraf signifikan 95% maka H_0 ditolak, H_1 diterima.
Berarti praktik primordialisme dalam penerimaan CPNSD berpengaruh terhadap rendahnya profesionalisme kerja pegawai.
- b. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ pada taraf signifikan 95% maka H_1 ditolak, H_0 diterima.
Berarti praktik primordialisme dalam penerimaan CPNSD tidak berpengaruh terhadap rendahnya profesionalisme kerja pegawai.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka diketahui perbandingan dalam pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} \text{ pada taraf signifikan 95\% yaitu } 28,430 > 1,671$$

(Nilai t_{tabel} terdapat dilihat pada Lampiran 6).

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan 95% maka H_0 ditolak, H_1 diterima, artinya praktik primordialisme dalam penerimaan CPNSD berpengaruh secara signifikan terhadap rendahnya profesionalisme kerja pegawai.

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa adanya praktik primordialisme dalam Penerimaan CPNSD memberikan pengaruh yang negatif, yaitu rendahnya profesionalisme kerja pegawai. Hal ini disebabkan karena kurang terpenuhinya nilai-nilai ideal dalam penerimaan pegawai yaitu prinsip orang yang tepat pada posisi yang tepat (*the right man on the right place*). Oleh karena itu, primordialisme dalam penerimaan CPNSD harus diantisipasi dan dihindari, namun yang harus dikedepankan adalah pertimbangan kualitas SDM yang akan menjadi CPNSD, sebab jika tidak maka kinerja CPNSD dapat dipastikan tidak akan maksimal karena mereka tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan di bidang kerjanya. Dalam konteks jangka panjang, hal ini akan berdampak pada terhambatnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena menerima para CPNSD yang tidak sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Primordialisme dalam penelitian merupakan suatu keadaan di mana proses penerimaan CPNSD oleh pemerintah daerah, orang-orang yang diterima adalah mereka yang memiliki keterikatan secara etnis atau kekerabatan dengan para pejabat pemerintah daerah. Dalam konteks penerimaan CPNSD, praktik primordialisme dapat berpengaruh terhadap rendahnya profesionalisme kerja pegawai yang bersangkutan, karena ia diterima tidak berdasarkan kapasitas dan kemampuannya dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Wilson Simamora

(2005: 46), bahwa apabila penerimaan pegawai tidak dilakukan secara ketat dan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan keterampilan kerjanya maka hampir dapat dipastikan pegawai tersebut tidak dapat bekerja secara profesional dan dampaknya akan mengganggu sistem organisasi yang bersangkutan.

Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah melalui sumber daya manusia yang berkualitas yang akan membuat kebijakan dan melaksanakan pembangunan sehingga daerah tersebut akan mampu mandiri. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia mutlak dilakukan untuk menghasilkan manusia yang profesional, bermoral, bertanggung jawab, kreatif, berprestasi dan berkualitas yang akan meningkatkan kualitas mutu pelayanan terhadap masyarakat. Aspek substansial, kebijakan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional memerlukan definisi yang jelas tentang kualifikasi profesionalisme yang ingin dicapai pada berbagai bidang tugas. Otonomi daerah pada dasarnya akan terselenggara dengan baik apabila didukung oleh faktor-faktor seperti tersedianya sumber daya-sumber daya yang berkualitas baik itu sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia mengingat faktor sumber daya manusia merupakan faktor dominan yang menentukan kualitas sistem dan kegiatan administrasinya untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan otonomi daerah, namun sayang, nilai-nilai ideal ini terkotori oleh praktik primordialisme, sehingga pegawai tidak dapat bekerja secara profesional.

Profesionalisme pegawai yang dimaksud sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2001: 50-55), dengan alasan bahwa komponen-komponen profesionalisme kerja pegawai yang dikemukakannya sudah cukup lengkap dan beragam, yang meliputi performansi, akuntabilitas, responsibilitas, loyalitas, kemampuan dan kompetensi aparatur.

Primordialisme dalam penerimaan CPNSD adalah hal yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena pandangan kesukuan dan kekerabatan yang sempit, sehingga sebaiknya sangat diperlukan upaya antisipasi. Upaya antisipasi primordialisme pada penerimaan CPNSD sangat diperlukan upaya untuk kembali menghayati hakikat kebangsaan, bahwa bangsa Indonesia mempunyai identitas kebangsaan yaitu beranekaragamnya suku, kelompok etnis, golongan agama, budaya dan bahasa yang seharusnya dapat diselaraskan secara ideal tanpa mengedepankan primordialisme.